

Kepala Daerah Harus Menjaga Komitmen Pemberantasan Korupsi

YOGYA (KR) - Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena bersifat sistemik, massif, terstruktur dan terorganisir, serta berskala luas. Oleh karena itu, seluruh aparat pemerintahan sudah seharusnya dibekali pemahaman akan bahaya laten korupsi dan pencegahannya.

Rapat rutin menjadi bagian dari upaya preventif, agar negara dapat dikelola secara bersih dan bermartabat. Edukasi sejak dini dan berkelanjutan akan menye-



Setyo Budiyo didampingi Sri Sultan HB X dan Khofifah Indar Parawansa saat memberikan keterangan kepada media.

lamatkan bangsa ini dari bahaya laten korupsi dari generasi ke generasi.

"Korupsi mengikis kemampuan institusi pemerintah, karena pengabaian prosedur dan pengurusan sumber daya. Sedangkan pada saat yang bersamaan, korupsi mendelegitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi. Terutama trust dan toleransi, sehingga menghambat proses demokrasi dan penyelenggaraan good governance," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi Wilayah Penguatan Integrasi dan Pemantapan Sistem Pencegahan Korupsi di Jogja Expo Center, Rabu (19/3).

Sultan mengatakan, secara spesifik, korupsi berdampak negatif pada sektor ekonomi dan kesejahteraan umum. Dampak ekonominya mencakup memperlambat pembangunan, karena menimbulkan in-efisiensi. Di sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga, karena kerugian dari pembayaran ilegal yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan umum.

"Korupsi politis memberikan ancaman besar bagi warga negara karena hanya menguntungkan oknum tertentu, bukan rakyat luas. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi kepada KPK atas terselenggaranya acara hari ini. Menjadi harapan kita, pemahaman pencegahan korupsi sudah seharusnya diintegrasikan dan diintegrasikan secara multi sektor dan multi segmen, imbuh Sultan.

Sementara itu komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemprov Jatim mendapatkan apresiasi dari KPK RI. KPK memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemprov Jatim sebagai provinsi peringkat kedua peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024, Kategori Pemprov pada Wilayah Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK. Piagam Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyo kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

"Penghargaan ini merupakan buah kerja keras dan wujud komitmen yang dilakukan seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam upaya pencegahan korupsi. Alhamdulillah Indeks Nilai MCP Jatim pada tahun 2024 mencapai 94 persen, capaian MCP Jatim ini berada di atas rata-rata nasional yang angka 76 persen," terang Khofifah.

Sedangkan Ketua KPK, Setyo Budiyo menyatakan, kepala daerah sebagai pemimpin sudah seharusnya bisa menjaga komitmen pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dirinya berharap, seluruh kepala daerah bisa mengontrol, memonitor, dan memantau semua hal dalam upaya pencegahan korupsi.

"Kepala daerah sudah melewati banyak tantangan. Mereka sudah melalui pendidikan, pelatihan, dan proses panjang yang tidak mudah. Setelah dilantik dan membaca sumpah, komitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus dijaga," paparnya. (Ria)-f

Jelang Libur Lebaran, Waspada Cuaca Ekstrem

YOGYA (KR) - Pada libur Lebaran tahun 2025 ini, diperkirakan 1,05 juta - 1,1 juta wisatawan bakal mengunjungi berbagai destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Angka prediksi tersebut mengacu pada proyeksi kenaikan pergerakan wisatawan sebesar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dr Destha Titi Raharjana SSos MSI, peneliti Pusat Studi Pariwisata (Puspas) UGM, mengatakan secara ekonomi pergerakan manusia dengan tujuan mudik memberikan dampak signifikan berupa perputaran uang yang beredar. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati kaum pemudik. "Pada Lebaran 2025 ini, DIY diduga tetap menjadi tujuan favorit pemudik. Terlebih dengan kemudahan akses atau konektivitas yang dapat dijangkau dari berbagai wilayah untuk berwisata," paparnya di Puspas UGM, Rabu (19/3).

Meski begitu, Destha menyayangkan karena Lebaran tahun ini tampaknya masih dihantui dengan ancaman cuaca ekstrem. Melansir informasi dari BMKG DIY kemungkinan masih akan berlangsung cuaca ekstrem. Risiko cuaca ekstrem diduga baru akan mengalami penurunan pada sepuluh hari pertama Bulan April 2025.

"BMKG DIY memprediksi cuaca ekstrem di wilayah Yogyakarta masih akan berlangsung hingga April 2025. Berdasar informasi Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, cuaca ekstrem ini dapat berupa hujan lebat, petir, dan angin kencang," paparnya.

Terkait hal tersebut, menurut Destha, pemerintah dan pengelola wisata perlu melakukan upaya-upaya preventif dalam menyambut suasana Lebaran di tengah musim hujan. Pemerintah dan pengelola wisata harus bisa memastikan tidak terjadi genangan air dan tumpukan sampah selama masa lebaran, ser-

ta mengantisipasi berbagai kemungkinan kerusakan akibat bencana angin kencang dan lain-lain.

"Jika turun hujan lebat dan lama, maka harus bisa dipastikan air tidak tersumbat, tidak ada timbunan sampah karena beberapa waktu terakhir kota kita terpa persoalan ini. Secara berkala perlu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pohon sebagai upaya mengurangi terjadinya resiko bencana oleh dinas terkait," paparnya.

Destha berpandangan perlunya contingency plan yang harus disiapkan pemerintah dan pihak pengelola wisata agar ketika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki para pengunjung saat berwisata akan cepat terkondisikan. Komunikasi dengan pihak terkait, baik dari sektor keamanan dan kesehatan menjadi keharusan yang perlu dijalin untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

Destha mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Sleman Tangguh Bencana (SIMANTAB). Melalui aplikasi ini diinformasikan berbagai pelaporan bencana, informasi kebencanaan, peringatan dini, dan berbagai menu lainnya di dalamnya.

Sementara di tingkat desa, seperti yang dilakukan pengelola Desa Wisata 'Dewi Mulia' Srimulyo Bantul, mereka berinisiatif menggaas sebuah aplikasi yang dimanfaatkan sebagai early warning system. Prototype aplikasi ini telah dicoba dan diterapkan di Kaligawe. Melalui aplikasi ini mampu memantau ketinggian muka air sungai.

"Aplikasi ini digagas dalam rangka mengantisipasi dampak banjir yang mengancam bantaran sungai, khususnya wisata berbasis sungai sehingga langkah antisipatif pengamanan area bantaran sungai dapat diambil sebelum terjadi dampak merugikan," pungkasnya. (Dev)-f

DI TENGAH KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN Pengentasan Kemiskinan Jalan Terus

YOGYA (KR) - Meski terkena kebijakan efisiensi anggaran, Pemda DIY tidak akan mengurangi pelaksanaan berbagai program atau aktivitas terkait penanganan kemiskinan. Upaya-upaya mengentaskan kemiskinan di DIY akan terus berjalan, lantaran turut berdampak pada sektor lainnya, seperti kesehatan. Salah satu contoh program pengentasan kemiskinan yang tidak dikurangi, yakni Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).

"Kami tidak mengurangi jaminan sosial bagi lanjut usia. Yang kemarin target tahun ini saya tambah 8.000, tapi karena kondisi semacam ini tidak kita tambah dulu, tetap targetnya 8.000. Tapi dari 8.000, dari penerima pertama sudah berkurang 1.270-an yang meninggal. Jadi bisa menambah yang baru yang belum masuk daftar. Jadi untuk penanganan kemiskinan tetap kita jalankan. Karena nanti dampaknya ke stunting dan seterusnya rembesannya ke sana," kata Sekda DIY, Beny Suharsono di Griya Dhahar

RB Yogyakarta, Selasa (18/3) malam.

Beny mengungkapkan, meski ada kebijakan efisiensi anggaran pembangunan wilayah selatan DIY masih menjadi fokus dan prioritas pembangunan. Karena anggaran dari Dana Keistimewaan pun dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah DIY bagian selatan. Untuk itu, koordinasi bersama para bupati dari kabupaten terkait akan dilakukan guna menyelaraskan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan.

"Tak hanya menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Sebagaimana arahan pemerintah pusat, saat ini DIY juga sedang menyiapkan Sekolah Rakyat. Sedang dikaji, kami sedang mencari alternatif untuk Sekolah Rakyat, karena lahan yang diminta kurang-kurangnya 5 hektar sampai 10 hektar," ungkapnya.

Menurut Sekda DIY, dengan adanya sekolah rakyat akan membuka kesempatan yang sangat luas bagi masyarakat yang ku-

rang beruntung atau belum beruntung untuk disekolahkan secara gratis oleh pemerintah. Tidak hanya itu nantinya mereka juga akan diasramakan. "Kami sedang mencari alternatif untuk pemanfaatan lahan serta kesiapannya," ujar Beny.

Beny menyatakan, pelaksanaan Sekolah Rakyat di DIY rencananya dilakukan bukan dengan membangun dari nol. Melainkan menyasar pada sekolah berlahan luas yang sudah ada, dengan peserta didik yang sedikit.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembahasan mengenai penyelenggaraan Yogyakarta City 10 K (YK10K) Race. Ketua Penyelenggara YK10K Septiyadi Pityanta menjelaskan, event lari YK10K akan digelar pada 27 April 2025 mendatang, dengan start finish Halaman Kepatihan, Kantor Gubernur DIY. Event lomba lari itu menjadi gelaran baru di Indonesia karena menjadi event lari pertama dengan batas waktu terpendek kategori 10K, yaitu 70 menit. (Ria)-f

JAGONGAN KELURAHAN DINAS PMK DUKCAPIL DIY SAMPANGI KEMANTREN JETIS Warga Keluhkan Persoalan Sampah dan Tanah Tak Terurus



Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY, Penghageng Kawedanan Panitikismo, Wakil Wali Kota Jogja, dan beberapa Kepala OPD Pemda DIY saat berdialog dengan warga dalam acara Jagongan Kelurahan, di Bumijo, Jetis, Kota Jogja, Senin (17/3/2025).

YOGYA (KR) - Jagongan Kelurahan untuk belanja masalah sekaligus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan sosial-kemasyarakatan yang diinisiasi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dinas PMK Dukcapil) DIY kembali digelar. Kali ini, jagongan kelurahan diadakan di Kantor Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Jogja, Senin (17/3/2025). Masalah sampah dan tanah menacuat dalam jagongan malam itu.

Turut hadir dalam jagongan kelurahan ini Wakil Wali Kota Jogja, Penghageng Kawedanan Panitikismo, Paniradya Pati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Plt Kasatpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kepala Disnakertrans DIY, Badan Kesbangpol DIY, Kepala DLH Kota Jogja. Hadir juga Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO), Badan Narkotika Nasional Kota Jogja, perangkat kelurahan se-Kemantren Jetis, dan tokoh masyarakat.

Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY KPH. H. Yudanegara, Ph.D., mengungkapkan tujuan Jagongan Kelurahan untuk berdiskusi dan mencari solusi. Dari Pemda DIY keliling untuk belanja masalah di Kemantren Jetis. Acara ini, kata Kanjeng Yudanegara, sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara langsung sesuai pesan Ngarso Dalem yaitu masyarakat harus dilayani dengan baik.

"Kenapa memilih Bumijo karena

selain zona merah, wilayah ini juga terdapat dua wilayah sungai dan terdapat permasalahan yang cukup kompleks," kata Kanjeng Yudanegara.

Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan menunturkan prioritas Pemkot sampai lebaran nanti adalah pengosongan 14 depo sampah secepat mungkin. Dia mengungkapkan ada 40 titik tempat pembuangan liar dan Pemkot sudah bekerja keras agar tidak ada lagi yang membuang sampah di depo liar.

"Untuk pengadaan gerobak sampah sudah mulai proses registrasi. Gerobak akan dibagikan per RW, tidak boleh ada warga yang langsung buang sampah ke depo, harus ke transporter lebih dulu. Ini agar lebih termonitor. Depo yang sudah bersih tidak diisi lagi sampah. Kami sediakan truk untuk mengangkut ke TPS," urai Wawan.

Plt Kepala DLH Kota Jogja Agus Tri Haryono menambahkan saat ini sudah ada 1.026 penggerobak dan semua memiliki kartu identitas. Jika penggerobak tidak memiliki kartu identitas, sampah yang dibawa tidak akan diterima. "Satu RW satu gerobak dengan sistem hibah, namun harus ada proposalnya terlebih dahulu petugas transporter akan diseragami. Di gerobaknya ada kode wilayah pembuangan," jelas Agus Tri Haryono.

Agus Supriyadi dari LPMK Bumijo mengatakan di wilayahnya ada tanah milik KAI dan ada tempat pembuangan sampah liar. Warga memberanikan diri untuk mengelola dan memilah sampah. Namun

kata dia, di lahan tersebut belum jelas status tanahnya.

Agus menambahkan di sisi selatan ada lahan yang sangat kotor tapi KAI, kata dia, tidak tahu menahu kondisi lahan tersebut. "Warga ingin mengelola, bukan membangun (di atas lahan itu). Hanya akan kami pakai untuk gapoktan," katanya.

Menjawab persoalan ini, Penghageng Kawedanan Panitikismo KRT Suryo Satriyanto mengatakan status tanah yang berada di utara kelurahan Bumijo yang dikuasai PT KAI itu merupakan tanah Kasultanan. Terkait lahan di sisi selatan, Panitikismo akan meminta izin untuk berkomunikasi dengan KAI.

"Kami akan meminta lila untuk berkomunikasi ke PT KAI, untuk menyampaikan ada ketidaknyamanan masyarakat terkait lahan yang tidak terurus di wilayah Kelurahan Bumijo," ujar KRT Suryo.

Sedangkan Tri Agus selaku Ketua RW 39 menyoroti persoalan zona merah di wilayahnya. Dia mengatakan BNN Kota Jogja sudah hadir di Bumijo dan memberikan peringatan status merah di wilayah itu. Di Bumijo juga sudah ada jaga warga, namun belum ada kegiatan. "Kami ingin mengajukan kegiatan pembesaran lele di lahan kosong milik KAI. Harapannya bisa mengurangi risiko zona merah seperti yang disampaikan BNN," katanya.

Untuk sesi Jagongan Kelurahan berikutnya, akan dilaksanakan di Kalurahan Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo pada 21 Maret 2025. (*)

Hasuna Tour Distribusikan Pengembalian Dana Manfaat Haji Khusus



Proses pengembalian dana manfaat jemaah haji khusus Hasuna Tour.

YOGYA (KR) - Biro Umrah dan Haji Khusus Hasuna Tour melakukan pengembalian dana manfaat pada Senin-Sabtu (10-15/3). Dana manfaat merupakan proses pengembalian hasil investasi dana pendaftaran haji khusus yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kepada jemaah yang berhak berangkat di tahun tersebut.

"Banyak calon jemaah haji yang belum memahami apa itu dana manfaat. Bahkan tidak tahu jika dana manfaat tersebut merupakan hak yang seharusnya mereka terima dari BPKH melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat mendaftar haji," kata Manajer Marketing sekaligus Ustadz Pembimbing Haji Khusus Hasuna Tour, Windy dalam keterangannya, Rabu (19/3).

Dijelaskannya, Hasuna Tour setiap tahun selalu mengembalikan dana manfaat yang menjadi hak jemaah. Besarannya tentu berbeda setiap jemaah, tergantung lamanya masa tunggu haji mereka. Dihitung sejak mendaftar pertama kali hingga tahun keberangkatan. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Hasuna Tour dalam menjaga kepercayaan calon jemaah haji dari tahun ke tahun.

"Mudah-mudahan menjadi standar pelayanan yang diikuti Biro Haji Khusus lainnya. Alhamdulillah pencairan dana manfaat dari BPKH sudah kami salurkan sebagian.

Dana manfaat ini asalnya dari 4.000 dolar yang dibayarkan calon jemaah haji khusus saat mendaftar dan kemudian dikelola investasinya oleh BPKH," urainya.

Dari pencairan tersebut, rata-rata jemaah memperoleh sekira 2.000 riyal atau senilai Rp 9 jutaan rupiah. "Kami sengaja memberikan riyal agar jemaah bisa langsung memanfaatkannya sebagai sugu walaupun pada mulanya jemaah haji khusus tidak mendapatkan living cost. Harapannya dengan pengembalian dana manfaat dari BPKH ini dapat bermanfaat bagi jemaah haji khusus," imbuhnya.

Selain pengambilan dana manfaat, calon jemaah haji juga dibantu dalam melakukan Biometric melalui aplikasi Saudi Visa Bio sekaligus mengambil kelengkapan haji berupa koper. iKami berterimakasih banyak kepada Hasuna karena telah memberikan pelayanan terbaik. Ditambah adanya penyampaian dana manfaat yang diberikan," kata salah satu calon jemaah haji, Dwijo.

Sedang calon jemaah lainnya, Arief menambahkan dirinya merasa bahagia karena merasa diberikan sugu atau bekal dengan pengembalian dana manfaat tersebut. "Sebelumnya setahu saya haji khusus tidak diberikan living cost seperti haji reguler. Jadi bisa untuk sugu," tukasnya. (Feb)-f